

ANALISIS EFISIENSI MERGER BPR BKK SE-KABUPATEN SRAGEN

TESIS



Oleh

VERONICA KRISNI DAMAYANTI

NIM : P 10030038
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Pembangunan Nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana.

Untuk mengetahui lebih jauh peranan yang dapat dilakukan oleh suatu bank, dapat disimak dari definisi bank sebagai berikut: Suatu Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Sebelum terjadinya krisis perbankan di Indonesia, industri perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang bermunculan. Namun, krisis perbankan yang melanda semenjak pertengahan

tahun 1997, sangat berdampak terhadap industri perbankan di Indonesia., dengan kenyataan begitu banyak bank yang bermasalah, hingga dilikwidasinya maupun dibekuooperasikannya sejumlah bank di Indonesia.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebenarnya tidak kalah lama dibanding usia perbankan umum. Namun perlakuan yang berbeda membuat BPR seolah tenggelam di tengah hiruk pikuk pertumbuhan perbankan umum. Awalnya, banyak orang menganggap BPR tak lebih adalah renten yang dilembagakan dalam bentuk badan usaha jasa keuangan, berikut segala atribut legalitas formal yang melekat padanya. Tudingan ini menandakan adanya indikasi ketidakprofesionalan dalam manajemen BPR, karena standar yang dijadikan rujukan terfokus pada tingginya bunga pinjaman. Namun, seiring dengan perhatian besar Pemerintah terhadap perbankan umum, meski dengan jalan merambat, BPR terus menguat di pasaran usaha mikro.

Momentum bagus adalah tetap *survive*-nya BPR saat krisis perbankan dialami Indonesia tersebut, manakala pengelolaan bank-bank besar terbukti bermasalah. BPR mencoba tetap sebagai institusi bisnis yang berjalan sesuai *rule* dan tertib aturan Bank Indonesia (BI) sebagai pembina BPR. Ketangguhan eksistensi di puncak krisis ekonomi adalah bukti nyata bahwa BPR mampu mengendalikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan tetap menjaga likuiditasnya.

Dengan semakin berkembangnya BPR berarti semakin tersedianya kebutuhan modal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedesaan. Pesatnya

perkembangan BPR tidak lepas dari kunci sukses dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada usaha mikro dan kecil (UMK), seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan yang lebih sederhana kepada nasabah, serta lebih mengutamakan pendekatan *personal* serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

Di sisi lain, begitu banyak bank yang bermunculan membuat persaingan yang tajam antar bank-bank tersebut, maka besar tantangan yang harus dihadapi oleh BPR. Baik dari segi permodalan, faktor internal berupa perlunya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai maupun tantangan persaingan yang harus dihadapi dari lembaga keuangan sejenis. Sebagai contoh nyata adalah kehadiran bank-bank umum yang mulai memasuki pasar *micro-financing* yang selama ini adalah lahan BPR. Potensi pasar BPR yang besar membuat sejumlah bank umum tertarik ikut menggarap sektor tersebut.

Fenomena inilah yang perlu segera ditindaki dengan cermat. Upaya efisiensi perlu ditempuh BPR dalam menghadapi persaingan ini, mengingat selama ini efisiensi usaha yang dilakukan BPR belum optimal, karena dihadapkan pada keterbatasan dana murah dan risiko bisnis yang tinggi.

Dari segi permodalan, keterbatasan modal BPR dapat menjadi faktor yang membahayakan BPR dalam persaingan tersebut. Hal ini mengingat bahwa bank umum yang tentunya bermodal lebih besar berani melempar kredit dengan suku bunga yang lebih rendah.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan segi permodalan, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai modal minimum bagi perbankan, yakni, 100 miliar untuk bank umum dan 20 miliar untuk BPR. Logikanya, semakin besar modal bank, maka semakin meningkat pula kemampuan bank mengelola risiko dan usaha operasional perbankan. Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah (*stakeholder*) yang pada akhirnya akan mampu memperkuat kembali permodalan melalui pemupukan laba ditahan.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) mengenai keharusan modal minimum bank tersebut, kepada bank yang memiliki modal kurang dari jumlah yang telah ditentukan disarankan untuk melakukan merger sehingga bisa tetap beroperasi dan memiliki struktur modal yang lebih kuat, dan batas waktu bagi bank yang masih dalam modal minimal adalah sampai tahun 2010. Nampak bahwa imbauan BI untuk pelaksanaan merger tersebut lebih ditujukan kepada bank komunitas yang diwakili oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada umumnya memiliki modal minimal 2 miliar rupiah.

Dalam hubungannya dengan hal penekanan aspek permodalan sebagai faktor dominan bagi sebuah bank, maka wacana merger BPR semakin mendapat perhatian sekarang ini, karena dalam menata struktur industri BPR, merger, konsolidasi ataupun akuisisi dianggap sebagai langkah strategis, yang ditujukan untuk mempercepat sinergi

BPR sehingga tercipta BPR yang sehat, kuat, tangguh dan efisien serta mampu membantu usaha kecil penggerak pembangunan.

Selain itu, dengan upaya merger, akan meniadakan persaingan yang tak sehat antar sesama BPR dalam wilayah yang sama. Terutama dalam hal ini adalah bagi BPR BKK yang sama-sama milik Pemerintah Daerah, sebagaimana BPR BKK milik Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan merger, diharapkan terbentuk pengelolaan operasional BPR BKK Kabupaten Sragen yang lebih efisien dengan manajemen bank yang lebih profesional, didukung oleh peningkatan kualitas SDM, dan yang mampu menghadapi tantangan persaingan.

Dalam pelaksanaan proses merger tersebut terbentur pada satu permasalahan pokok yakni terbatasnya dana yang tersedia pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai pemilik BPR BKK, termasuk kabupaten Sragen, yang sebenarnya berwacana untuk melaksanakan merger BPR BKK semenjak sekitar dua tahun yang lalu, namun hingga sekarang belum terlaksana.

Selain hal tersebut, potensi nilai sinergi bukanlah jaminan yang pasti diberikan dari setiap upaya merger. Namun, mengingat bahwa upaya merger perlu dilakukan demi ketentuan BI dan sebagai jawaban atas tantangan persaingan, maka tetap dilakukan upaya merger BPR BKK. Untuk itu perlu adanya kajian terlebih dahulu, apakah upaya merger BPR BKK se-Kabupaten Sragen akan memberikan sinergi yang lebih baik terhadap peningkatan profitabilitas. Apabila upaya merger tersebut tidak

memberikan sinergi pada saat ini, diharapkan dengan kajian tersebut dapat dijadikan satu referensi dalam melihat kemungkinan yang terjadi dengan adanya upaya merger BPR-BKK Se-Kabupaten Sragen. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusun termotivasi untuk mengadakan analisis efisiensi merger BPR BKK se-Kabupaten Sragen.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apakah upaya merger BPR-BKK Se-Kabupaten Sragen akan memberikan peningkatan efisiensi terhadap aspek solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas BPR-BKK hasil merger?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui adanya peningkatan efisiensi atas upaya merger BPR BKK Se-Kabupaten Sragen terhadap solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas BPR-BKK hasil merger.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari analisis terhadap tingkat kesehatan bank dalam tujuan mengetahui efisiensi merger bank adalah untuk kepentingan:

1. Untuk mengetahui posisi Solvabilitas, Likuiditas dan Rentabilitas BPR hasil merger dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya merger, sehingga bagi pengelola BPR-BKK kondisi tersebut yang dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan merger BPR-BKK.
2. Untuk memperoleh gambaran permasalahan-permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai dampak dilakukannya upaya merger, sehingga dapat dipertimbangkan alternatif solusi pemecahan untuk menjawab kendala tersebut.
3. Dari sudut pandang pemilik BPR-BKK (Pemerintah Propinsi Jateng, Pemkab Sragen dan BPD Jateng), memberikan gambaran bagaimana nilai yang diperoleh pemegang saham meningkat dengan adanya upaya merger.